

PERAN IMPLEMENTASI *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGUNGKAPAN *SUSTAINABILITY REPORTING*

THE ROLE OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN SUSTAINABILITY REPORTING DISCLOSURE

Gilbert Immanuel¹⁾, Elfina Astrella Sambuaga^{2,*})

^{1,2)}Universitas Pelita Harapan
e-mail: elfina_sambuaga@yahoo.co.id*

ABSTRACT

This research aims to provide empirical evidence on the influence of the implementation of corporate governance on sustainability reporting disclosure. The governance components in this study focus on the presence, educational background, and frequency of board of commissioners, board of directors, and audit committee meetings that contribute to the establishment, implementation, and oversight of sustainability-related company policies. The research sample consists of 78 non-financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the period 2020-2022, selected using a purposive sampling method. This research utilizes secondary data sources obtained from the official BEI website, the respective company websites, and S&P Capital IQ to fulfill the data completeness tested with a multiple linear regression model using SPSS application. The research results indicate that the size of the commissioners and the frequency of audit committee meetings have a positive impact on sustainability reporting disclosure. Meanwhile, the research proves that the size of independent commissioners, the size of the board of directors, the size of the audit committee, the educational background of commissioners, the educational background of independent commissioners, the educational background of directors, the frequency of board of commissioners' meetings, and the frequency of board of directors meeting do not have a significant impact on sustainability reporting disclosure. The implications of this research can raise awareness among business stakeholders and regulators about the importance of the role of commissioners and the frequency of audit committee meetings in enhancing sustainability reporting practices.

Keywords: *sustainability reporting, corporate governance, board of commissioners, directors, audit committee.*

1. PENDAHULUAN

Tujuan penelitian ini untuk memberikan bukti secara empiris mengenai peran dari praktik tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*, sebagaimana perkembangan saat ini bahwa tujuan perusahaan bukan sekedar menghasilkan keuntungan, melainkan juga berhubungan dengan keberlanjutan terkait aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berkaca pada isu keberlanjutan yang terjadi pada PT Toba Pulp Lestari, bahwa selama 34 tahun terhitung sejak tahun 2021, perusahaan ini telah melakukan pembuangan limbah tanpa izin yang mengakibatkan pencemaran air dan udara, hingga membuat masyarakat sekitar mengalami gangguan kondisi kesehatan oleh karena kerusakan lingkungan yang terjadi (Dirgantara, 2021). Selain itu, isu keberlanjutan yang serupa terjadi pada PT Sawit Inti Prima Perkasa, bahwa pada tahun 2022 perusahaan ini secara sengaja melakukan pembuangan limbah B3 secara langsung ke air sungai dan tidak mengikuti prosedur instalasi pengolahan limbah B3 sesuai dengan regulasi yang berlaku, dimana tindakan ini berdampak pada pencemaran lingkungan hidup dan menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar (Ikhsanudin, 2022).

Permasalahan keberlanjutan tersebut menggerakkan hati dan keinginan dari masyarakat,

investor, maupun para pemangku kepentingan atau *stakeholder* lainnya untuk setiap perusahaan memperhatikan dan menangani isu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sebagai bentuk dalam menanggapi masalah keberlanjutan tersebut dan memenuhi keinginan dari para pemangku kepentingan, pemerintah sebagai regulator membentuk regulasi terkait kewajiban pengungkapan hasil kinerja keberlanjutan dalam bentuk laporan keberlanjutan atau *sustainability reporting* sebagai regulasi yang wajib ditaati oleh perusahaan. Sehingga, adanya regulasi yang diatur oleh regulator menyadarkan perusahaan untuk mengimplementasikan praktik keberlanjutan dan menuangkannya dalam pengungkapan laporan keberlanjutan, dimana pemegang peran terpenting dalam hal ini adalah tata kelola perusahaan sebagai eksekutor yang mengelola kinerja keberlanjutan perusahaan dan mengarahkan serta mendorong perusahaan pada praktik pengungkapan laporan keberlanjutan.

Menurut Utama et al. (2022), tata kelola perusahaan merupakan suatu perangkat tata hubungan antara internal organisasi perusahaan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan, dimana tujuan dari tata kelola untuk menuntun dan mengontrol organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan itu sendiri. Penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia terlihat pada sistem dewan dua tingkat (*two-tier*) yang terdiri dari dua dewan yaitu dewan pengawas yaitu dewan komisaris dan dewan pelaksana yaitu direksi atau dewan direktur. Struktur dewan dua tingkat terlihat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (2014), bahwa dewan komisaris sebagai kumpulan individu yang bertanggung jawab dan bertugas dalam mengawasi kinerja direksi dan memberikan nasihat direksi serta berwenang dalam membentuk komite-komite untuk membantu komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan; dan direksi sebagai kumpulan individu yang memiliki tanggung jawab secara keseluruhan atas pengelolaan perusahaan. Dalam kewenangannya, direksi berhak mengambil keputusan strategis dan menetapkan kebijakan atau regulasi internal perusahaan atas dasar persetujuan dan pengesahan oleh dewan komisaris. Salah satu implikasi dari kebijakan perusahaan adalah terkait aspek non-keuangan yaitu laporan keberlanjutan atau *sustainability reporting*.

Laporan keberlanjutan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan untuk menyusun, hingga mempublikasikan informasi-informasi sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kinerja perusahaan itu sendiri baik berpengaruh positif maupun negatif terhadap keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan kemanusiaan atau masyarakat (*Global Sustainability Standards Board, 2023*). Kinerja keberlanjutan yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan atau *sustainability reporting* mengacu pada konsep *triple-p bottom line* sebagaimana dikemukakan oleh Elkington (1997), dimana terdapat aspek lain selain laba (*profit*) yang perlu menjadi fokus perhatian perusahaan yaitu aspek bumi (*earth*) dan aspek masyarakat (*people*). Artinya, ruang lingkup fokus perusahaan semakin luas, dimana perusahaan bukan hanya sebagai korporasi yang bertanggung jawab dalam mencari keuntungan bisnis sebesar-besarnya, namun juga dapat ikut andil dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan dapat mewujudkan kepedulian akan lingkungan sekitar khususnya terkait meminimalisir dampak alam.

Sebagai perwujudan dari konsep *triple-p bottom line*, peran dari tata kelola dalam mengaktualisasikan kinerja keberlanjutan terlihat pada segala prosedur yang ditetapkan oleh direksi pada seluruh aktivitas yang dijalani perusahaan. Sehingga, melalui prosedur pelaksanaan kinerja keberlanjutan berlaku pada suatu perusahaan dapat menuntun seluruh pihak internal dalam perusahaan untuk mengaktualisasikan upaya kinerja keberlanjutan dan dituangkan dalam bentuk laporan keberlanjutan atau *sustainability reporting* yang digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mengawasi (*monitoring*) kinerja keberlanjutan

perusahaan.

Salah satu penentu dari kualitas informasi keberlanjutan yang diterima oleh pemangku kepentingan ditentukan berdasarkan sesuai atau tidaknya perusahaan mengikuti kerangka kerja dalam standar yang berlaku khususnya berdasarkan standar GRI. GRI (*Global Reporting Initiative*) merupakan standar internasional yang umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, dimana standar ini sebagai alat komunikasi yang dapat dipahami oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan di seluruh dunia terkait mitigasi yang dilakukan perusahaan dalam meminimalisir dampak yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan itu sendiri terhadap ekonomi, lingkungan, maupun sosial (Global Sustainability Standards Board, 2023).

Berkaca pada fenomena aktual di Indonesia saat ini bahwa belum banyak perusahaan yang mengadopsi standar GRI, oleh karena tidak adanya aturan khusus yang mewajibkan seluruh perusahaan mengungkapkan *sustainability reporting* berdasarkan standar GRI. Hal ini terlihat dari penemuan yang dilakukan oleh peneliti bahwa hanya terdapat 79 perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan berdasarkan standar GRI secara konsisten selama tiga tahun mulai dari tahun 2020- 2022 dari total keseluruhan 888 perusahaan publik yang tercatat di BEI per Agustus 2023. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada peran implementasi tata kelola perusahaan sebagai faktor utama dalam menentukan seberapa besar intensi perusahaan dalam mengungkapkan segala kinerja keberlanjutan pada kerangka kerja berdasarkan standar GRI.

Menanggapi fenomena tersebut, penerapan tata kelola menjadi faktor terpenting yang mengeksekusi implementasi penerapan praktik pengungkapan laporan keberlanjutan melalui kebijakan internal terkait pengungkapan *sustainability reporting*. Penelitian ini membahas komponen tata kelola dari sisi keberadaan individu dalam komisaris, komisaris independen, direksi, dan komite audit; latar pendidikan komisaris, komisaris independen, dan direksi; dan jumlah pelaksanaan rapat dewan komisaris, direksi, dan komite audit. Ketiga hal ini dirasa penting oleh karena fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaan dalam tata kelola tercermin dari keberadaan dan atribut dewan komisaris, direksi, dan komite audit.

2. LANDASAN TEORI

2.1 *Stakeholders Theory*

Dalam perspektif tata kelola perusahaan, berdasarkan Fogarty & Rezaee (2019) teori pemangku kepentingan atau *stakeholder theory* menekankan pada tujuan utama perusahaan pada pencapaian kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan yang berkelanjutan guna menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Salah satu dari kinerja perusahaan yaitu kinerja non-keuangan tercermin dalam kinerja keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan. Zhou et al. (2019) memandang kinerja keberlanjutan sebagai tindakan nyata yang bersifat *value added* dan dapat menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Namun, untuk memenuhi keinginan, kebutuhan, dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan, diperlukan kebijakan internal yang ditetapkan perusahaan. Para pemangku kepentingan dapat menilai kinerja keberlanjutan perusahaan jika terdapat bukti yang dapat dipercayai oleh pemangku kepentingan bahwa perusahaan telah memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Bukti tersebut tercermin dari pengungkapan *sustainability reporting*, dimana dalam laporan inilah segala realisasi tindakan keberlanjutan termasuk integrasi seluruh kegiatan operasional dalam mencapai kinerja keberlanjutan yang dilakukan perusahaan dapat dilihat dan dinilai oleh para pemangku kepentingan.

2.2 *Legitimacy Theory*

Secara umum, suatu organisasi dapat mengukur dan menilai legitimasi dengan menelaah nilai maupun norma yang berlaku di dalam suatu lingkungan masyarakat, sehingga organisasi dapat berusaha untuk menunjukkan perilaku yang layak secara ekonomi, perilaku yang legal secara hukum, dan perilaku yang sah sesuai dengan nilai dan norma masyarakat (Dowling & Pfeffer, 1975). Sehubungan dengan ini, Fogarty & Rezaee (2019) menegaskan bahwa dalam teori legitimasi terdapat kontrak sosial yang sifatnya mengikat perusahaan dan cenderung mendorong perusahaan untuk secara efektif mengkomunikasikan tata kelola kepada para pemangku kepentingan dengan tujuan untuk memperoleh dukungan sosial dan mempertahankan serta mendapatkan reputasi perusahaan. Jaminan atas efektivitas penerapan tata kelola bagi para pemangku kepentingan tercermin dilihat melalui kinerja atau performa keuangan maupun non-keuangan perusahaan itu sendiri (Fogarty & Rezaee, 2019).

Salah satu dari kinerja perusahaan yaitu kinerja non-keuangan tercermin dalam kinerja keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Fogarty & Rezaee (2019), perusahaan yang mengungkapkan informasi keberlanjutan sehubungan dengan kinerja dalam lingkup ekonomi, lingkungan, dan sosial yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan, maka perusahaan akan mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari masyarakat oleh karena kredibilitas perusahaan dalam memberikan informasi keberlanjutan secara transparan kepada para pemangku kepentingan.

2.3 *Sustainability Reporting*

Laporan keberlanjutan atau *sustainability* ditujukan untuk kepentingan para pemangku kepentingan pada lingkup internal perusahaan maupun pemangku kepentingan di luar lingkup perusahaan (Fogarty & Rezaee, 2019). Berdasarkan standar GRI atau *Global Reporting Initiative*, laporan keberlanjutan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan untuk menyusun, hingga mempublikasikan informasi-informasi sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kinerja perusahaan itu sendiri baik berpengaruh positif maupun negatif terhadap keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan kemanusiaan atau masyarakat (Global Sustainability Standards Board, 2023).

Dalam standar GRI, aspek keberlanjutan ekonomi, lingkungan, maupun sosial atau masyarakat merupakan topik material yang tertuang di dalam standar ini. Topik material ditentukan perusahaan berdasarkan proses identifikasi dan penilaian dampak operasional perusahaan yang paling signifikan terhadap ketiga aspek keberlanjutan, dimana proses penentuan topik material ini melibatkan para pemangku kepentingan. Dalam topik material, hal-hal yang diungkapkan perusahaan merupakan pemaparan atas uji tuntas yang dilakukan terkait proses identifikasi, pencegahan, mitigasi, hingga pertanggungjawaban atas dampak yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan terhadap ketiga aspek keberlanjutan (Global Sustainability Standards Board, 2023).

2.4 *Corporate Governance*

Fogarty & Rezaee (2019) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai gambaran dari pengaturan mekanisme dan kelembagaan pada suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi dan bahkan dipengaruhi dari peran setiap individu-individu di dalam struktur tata kelola perusahaan. Dalam tata kelola, struktur dewan yang umum digunakan adalah *one-tier* dan *two-tier*, dimana struktur *one-tier* diterapkan oleh negara Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Kanada; dan struktur *two-tier* yang banyak diterapkan oleh negara Jerman, Belanda, termasuk Indonesia (Utama et al., 2022). Peran yang dimiliki oleh direktur eksekutif sebagai pengawas dan pelaksana dalam konteks *one-tier* diperankan oleh dua dewan yang berbeda

dalam model *two-tier*, yaitu: dewan komisaris yang terdiri dari komisaris dan komisaris independen sebagai fungsi pengawas yang berperan dalam pemantauan terhadap kinerja direksi dan dewan direktur atau direksi sebagai fungsi pelaksana yang berperan dalam pengelolaan perusahaan termasuk pengambilan keputusan strategis.

Berkaitan dengan jumlah dewan komisaris dan direksi diatur dalam POJK Nomor 33 Tahun 2014, bahwa minimal keanggotaan dewan komisaris terdiri dari 2 individu, dimana salah satu diantaranya merupakan komisaris independen atau proporsi keanggotaan komisaris independen 30% dari total keseluruhan anggota dewan komisaris dan minimal keanggotaan direksi terdiri dari 2 individu termasuk didalamnya seorang direktur utama. Kemudian, berkaitan dengan jumlah keanggotaan dalam komite audit diatur dalam POJK Nomor 55 Tahun 2015, bahwa komite audit terdiri dari minimal 3 individu yang di dalamnya diketuai oleh seorang komisaris independen dan anggota lainnya terdiri individu yang merupakan pihak eksternal perusahaan.

Terkait dengan latar pendidikan dewan komisaris dan direksi tidak diatur oleh karena belum terdapat regulasi yang mengatur hal ini di Indonesia. Kemudian, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan terkait tata kelola perusahaan ini salah satunya didukung dengan adanya aktivitas berupa rapat yang diadakan komisaris, direksi, dan komite audit. Berdasarkan POJK Nomor 33 Tahun 2014 bahwa dewan komisaris harus melaksanakan rapat minimal 6 kali setiap tahunnya atau setiap dua bulan mengadakan rapat 1 kali dan direksi harus melaksanakan rapat minimal 12 kali setiap tahunnya atau mengadakan rapat 1 kali setiap bulan. Tidak hanya itu, baik dewan komisaris maupun direksi wajib mengadakan rapat gabungan bersama minimal 3 kali dalam satu tahun atau melaksanakan rapat 1 kali setiap caturwulan. Lalu, sesuai dengan POJK Nomor 55 Tahun 2015 bahwa komite audit diwajibkan melaksanakan rapat sebanyak minimal 4 kali dalam setahun atau 1 kali setiap triwulan.

2.5 Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh *Commissioners Size* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Reporting*

Tjahjadi et al. (2021) memaparkan bahwa ukuran dewan komisaris yang dilihat dari jumlah individu di dalamnya merupakan representatif dari tercapainya kepentingan pemegang saham yang lebih efisien dan menunjukkan keefektifan dalam menerima informasi-informasi selain kinerja ekonomi dan keuangan, yaitu aspek sosial dan lingkungan yang berdampak pada pengambilan keputusan keberlanjutan. Girella et al. (2022) memberikan hasil penemuan yang mendukung bahwa semakin tinggi jumlah dewan pada suatu perusahaan maka perusahaan semakin bersedia dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan dan laporan terintegrasi. Hasil penelitian yang serupa ditemukan oleh Erin & Adegboye (2022) dan Hu & Loh (2018) bahwa ukuran dewan yang menjadi salah satu pendekatan dari atribut dewan menentukan peningkatan kualitas laporan terintegrasi. Banyaknya individu dalam komisaris akan semakin efektif dalam memastikan bahwa direksi sebagai manajemen perusahaan telah mematuhi pedoman laporan keberlanjutan yang berlaku dan memberikan nasihat kepada direksi sehubungan dengan informasi terkait isu keberlanjutan yang perlu diungkapkan dalam laporan keberlanjutan.

H1: *Commissioners size* memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.

2.5.2 Pengaruh *Commissioners Independence Size* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Reporting*

Eksistensi dewan komisaris independen yang berada di luar hubungan keluarga dengan anggota komisaris internal perusahaan, di luar kepengurusan internal perusahaan, dan di luar

kepemilikan saham perusahaan, cenderung lebih objektif dalam mendukung tercapainya kepentingan para pemangku kepentingan sehingga lebih intens dalam mempromosikan praktik pelaporan keberlanjutan (Al-Qudah & Houcine, 2023). Sejalan dengan pengungkapan oleh Madona & Khafid (2020) bahwa besaran komposisi dewan komisaris independen pada perusahaan akan menentukan kemampuan dewan komisaris non-independen dalam mengambil keputusan guna melindungi kepentingan para *stakeholder* dan mengarah pada pengambilan keputusan yang objektif. Serupa dengan hasil penelitian oleh Appiagyei et al. (2022) dan Githaiga & Kosgei (2023) bahwa semakin besar efektivitas dewan yang diukur berdasarkan besaran jumlah independensi cenderung meningkatkan kualitas laporan terintegrasi. Selanjutnya, Girella et al. (2022) mengungkapkan bahwa independensi dewan memiliki peran paling dasar dalam melakukan pemantauan terhadap perilaku manajemen dalam perusahaan dan dalam memotivasi perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan laporan yang pada dasarnya harus diterbitkan untuk kepentingan *shareholder* maupun *stakeholder*. Oleh karena itu, semakin banyak individu dalam komisaris independen akan melihat secara objektif kekurangan pengungkapan informasi keberlanjutan yang perlu ditambahkan dalam laporan keberlanjutan.

H2: *Commissioners Independence size* memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.

2.5.3 Pengaruh *Directors Size* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Reporting*

Ukuran manajemen tingkat atas yaitu direksi berdasarkan jumlah keanggotaan di dalam struktur direksi, Hasil penelitian oleh Erin et al., (2022) menemukan bahwa semakin besar jumlah dewan cenderung meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian oleh Anyigbah et al. (2023) menemukan bahwa pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) meningkat seiring dengan besarnya jumlah individu yang menjabat sebagai direksi..

H3: *Directors size* memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.

2.5.4 Pengaruh *Audit Committee Size* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Reporting*

Pada penelitian yang dilakukan oleh Buallay & Al-Ajmi (2020) menemukan bahwa semakin besar jumlah individu yang bertugas di dalam komite audit, maka semakin tinggi pengungkapan laporan keberlanjutan oleh karena adanya pengaruh signifikan positif antara ukuran komite audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil pengujian empiris oleh Erin et al. (2022) membuktikan bahwa besaran keanggotaan di dalam komite audit menentukan tingginya kualitas dari laporan keberlanjutan. Oleh karena itu, semakin besar jumlah anggota di dalam komite audit, maka semakin besar juga efektivitas dalam mengaudit setiap data informasi di dalam laporan keberlanjutan. Hasil temuan Erin & Adegboye (2022) menyatakan bahwa besarnya ukuran komite audit yang merupakan salah satu proksi dari atribut komite audit menentukan tingginya kualitas laporan terintegrasi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis keempat, sebagai berikut:

H4: *Audit Committee size* memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.

2.5.5 Pengaruh *Commissioners education background*, *Commissioners Independence education background*, dan *Directors education background* terhadap Pengungkapan *Sustainability Reporting*

Sejalan dengan konsep *upper echelon theory*, latar belakang fungsional sebagai

karakteristik yang membangun perspektif manajemen tingkat atas dalam mengambil keputusan strategis (Hambrick & Mason, 1984). Konsep ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Githaiga & Kosgei (2023) bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan meningkat seiring dengan besarnya proporsi dewan dengan keahlian keuangan yang memiliki basis pengetahuan akuntansi dan keuangan. Serupa dengan hasil penelitian oleh Erin & Adegboye (2022) menemukan bahwa semakin besar karakteristik dewan yang diukur berdasarkan dewan dengan keahlian keuangan maka kualitas laporan terintegrasi meningkat. Serupa dengan hasil penelitian oleh Ahmad et al. (2018) bahwa dewan yang berlatar pendidikan keuangan cenderung dapat meningkatkan pelaporan CSR oleh karena memiliki pemahaman yang lebih baik terkait masalah lingkungan dan sosial melalui ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam bidang akuntansi sosial.

H5a: *Commissioners education background* memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.

H5b: *Commissioners independence education background* memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.

H5c: *Directors education background* memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.

2.5.6 Pengaruh *Board of Commissioners Frequency Meeting* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Reporting*

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Kumar et al. (2022) menemukan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan meningkat seiring dengan besarnya jumlah frekuensi rapat dewan komisaris, dimana semakin sering diselenggarakannya rapat dewan maka manajemen semakin didorong dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan untuk memenuhi harapan sosial seluruh pemangku kepentingan. Serupa dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Alkayed & Omar (2022) bahwa besarnya jumlah penyelenggaraan rapat dewan cenderung meningkatkan kualitas pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Oleh karena itu, melalui seringnya pelaksanaan rapat dewan komisaris dapat mendorong para direksi untuk secara intens berupaya dalam meningkatkan pengungkapan kinerja keberlanjutan perusahaan di dalam laporan keberlanjutan yang diimplementasikan oleh direksi melalui pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis.

H6: *Board of Commissioners frequency meeting* memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.

2.5.7 Pengaruh *Board of Directors Frequency Meeting* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Reporting*

Hasil penelitian oleh Anyigbah et al., (2023) bahwa karakteristik rapat dewan menentukan tingginya pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaan, dimana rapat dewan yang semakin sering dilakukan cenderung meningkatkan kemungkinan pengungkapan laporan informasi keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan selama tahun berjalan terkait kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Alshbili et al. (2020) memberikan hasil penelitian yang mendukung bahwa besarnya frekuensi rapat dewan berpengaruh positif meningkatkan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

H7: *Board of Directors frequency meeting* memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.

2.5.8 Pengaruh *Audit Committee Frequency Meeting* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Reporting*

Hasil temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Buallay & Al-Ajmi (2020) menemukan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan meningkat seiring dengan tingginya intensitas anggota-anggota di dalam komite audit dalam melaksanakan rapat komite audit. Hasil penelitian tersebut juga didukung dengan fakta kebenaran umum bahwa seiring dengan meningkatnya intensitas anggota-anggota di dalam komite audit melakukan rapat dalam bertukar pengetahuan dan pendapat, maka kesadaran setiap anggota untuk mendorong terciptanya transparansi informasi non- keuangan dalam laporan keberlanjutan juga akan meningkat (Buallay & Al-Ajmi, 2020). Namun, berkontradiksi dengan hasil penelitian oleh Giannarakis et al. (2020) bahwa tingginya tingkat frekuensi rapat yang dilaksanakan omite komite audit tidak menentukan tingginya pengungkapan aspek lingkungan dalam laporan keberlanjutan.

H8: *Audit Committee frequency meeting* memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan seluruh perusahaan di Indonesia yang tercatat di dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rentang tahun 2020 hingga tahun 2022, dimana total keseluruhan populasi yang menjadi landasan penentuan sampel penelitian adalah sebesar 888 perusahaan. Metode penentuan sampel yang diimplementasikan pada penelitian ini adalah metode purposive sampling sebagaimana disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1Kriteria Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Perusahaan yang termasuk dalam seluruh sektor berdasarkan situs resmi BEI periode 2020-2023 yang terdaftar per Agustus 2023	888
(-) Perusahaan yang tergolong sektor <i>financials</i>	(104)
(-) Perusahaan yang tidak melaporkan <i>sustainability reporting</i> secara konsisten berdasarkan standar GRI pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022	(704)
(-) Perusahaan yang tidak melaporkan <i>annual report</i> secara konsisten pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022	(1)
Total perusahaan yang memenuhi seluruh kriteria sampel	78
Jumlah periode observasi penelitian	3
Total data sampel yang diobservasi	234

Sumber: Diolah Penulis (2023)

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa data yang ditelusuri berdasarkan *sustainability report* dan *annual report* yang diterbitkan dan dipublikasikan oleh masing-masing perusahaan pada situs *web* resmi perusahaan itu sendiri dengan rentang periode 2020 hingga 2022. Selain itu, sumber data sekunder lain berasal dari *platform* S&P yang digunakan untuk menarik data keuangan terkait keperluan pemenuhan variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda dengan menguji secara langsung sepuluh variabel independen dan empat variabel kontrol terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan

sustainability report (SRDI). Dalam proses perhitungannya dilakukan *content analysis* berbasis *dummy variable* dengan bilangan biner, yaitu memberikan nilai 1 untuk masing-masing item keberlanjutan yang diungkapkan perusahaan dan memberikan nilai 0 untuk masing-masing item keberlanjutan yang tidak diungkapkan. Selanjutnya, dilakukan penjumlahan nilai dari setiap item keberlanjutan yang diungkapkan dan dibagi dengan jumlah item berdasarkan standar GRI 2016 yaitu 247 item.

Variabel independen mencakup sepuluh variabel independen tata kelola yang digunakan. *Commissioners size* (UK) yang berbasis jumlah individu yang menjabat sebagai komisaris (Chams & García-Blandón, 2019). *Commissioners independence size* (UKI) mengindikasikan proporsi individu yang menjabat sebagai komisaris independen pada jumlah keseluruhan komisaris (Zahid et al., 2020). *Directors size* (UD) diproksikan dengan jumlah seluruh individu yang menjabat sebagai direksi (Tjahjadi et al., 2021). *Audit committee size* (UKA) yang berbasis jumlah keseluruhan individu yang bertugas di dalam komite audit (Erin et al., 2022). *Commissioners education background* (LPK), *Commissioners independence education background* (LPKI), dan *Directors education background* (LPD) merujuk pada proporsi dewan dengan keahlian keuangan, yaitu yang memiliki latar pendidikan pada ilmu pengetahuan ekonomi, akuntansi, keuangan di dalam jumlah keseluruhan direksi (Naheed et al., 2021). *Board of Commissioners frequency* (RDK) *meeting* merujuk pada jumlah penyelenggaraan rapat yang dilaksanakan oleh seluruh individu dewan pada tahun berjalan (Wijayanti & Setiawan, 2023). *Board of Directors frequency meeting* (RDD) diproksikan dengan total keseluruhan rapat yang dilaksanakan oleh seluruh individu direktur dalam struktur direksi selama satu tahun (Kumar et al., 2022).

Penelitian ini juga mencakup variabel kontrol sebagai pendukung pengujian model penelitian berupa: 1) ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma dari total aset; 2) likuiditas yang diukur berbasis *current ratio*; 3) profitabilitas yang diukur berbasis *return on assets*; dan 4) solvabilitas yang diukur berbasis *debt on equity ratio*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 2 menunjukkan hasil statistik deskriptif pada seluruh variabel yang digunakan dengan jumlah data yang dimiliki setiap variabel sebanyak 234 buah sesuai dengan jumlah sampel. Rata-rata pengungkapan item laporan keberlanjutan oleh perusahaan selama tiga tahun periode pengamatan sebesar 42,39% dari total keseluruhan 247 item berdasarkan standar GRI. Berdasarkan nilai rata-rata, 78 perusahaan yang menjadi objek penelitian dengan tiga tahun pengamatan mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2022 memiliki jumlah komisaris sebanyak 3 individu, proporsi komisaris independen sebesar 43% di dalam struktur dewan komisaris, jumlah direksi sebanyak 6 individu, jumlah keanggotaan komite audit sebanyak 3 individu, proporsi komisaris yang memiliki latar pendidikan keahlian keuangan sebesar 52% dari total individu sebagai komisaris, proporsi komisaris independen yang memiliki latar pendidikan keahlian keuangan sebesar 51% dari total individu sebagai komisaris independen, proporsi direksi yang memiliki latar pendidikan keahlian keuangan sebesar 61% dari total keseluruhan individu di dalam dewan direktur, frekuensi pelaksanaan rapat dewan komisaris sebanyak 16 kali dalam satu tahun, frekuensi pelaksanaan rapat direksi sebanyak 33 kali dalam satu tahun, dan frekuensi pelaksanaan rapat komite audit sebanyak 11 kali dalam satu tahun. Dalam tabel 2 juga menunjukkan nilai rata-rata dari ukuran perusahaan sebesar 16,53, likuiditas berbasis *current ratio* sebesar 204%, profitabilitas berbasis rasio *return on assets* sebesar 5,65%, dan solvabilitas berbasis rasio *debt on equity* sebesar 50,27%.

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SRDI	234	0.13	0.94	0.4239	0.16109
UK	234	0.00	9.00	2.9444	1.52557
UKI	234	0.00	1.00	0.4378	0.14047
UD	234	2.00	15.00	5.7051	2.11945
UKA	234	3.00	7.00	3.3547	0.76276
LPK	234	0.00	1.00	0.5202	0.35257
LPKI	234	0.00	1.00	0.5068	0.35757
LPD	234	0.00	1.00	0.6141	0.20984
RDK	234	3.00	88.00	16.3162	11.17373
RDD	234	7.00	151.00	33.4957	22.57886
RKA	234	0.00	62.00	11.641	11.04222
UP	234	12.93	19.84	16.5304	1.4194
LQDT	234	0.05	9.90	2.0419	1.60189
PFT	234	-0.17	0.46	0.0565	0.06774
LEV	234	0.10	1.85	0.5027	0.24266

Sumber: Diolah Penulis menggunakan SPSS 29 (2023)

4.2 Pengujian Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian asumsi klasik berupa normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Penelitian ini terindikasi adanya masalah normalitas oleh karena data tidak menyerupai kurva bel pada uji histogram dan memiliki nilai *asympt. sig (2 tailed)* sebesar 0,002 yaitu lebih kecil dari 0,05. Lalu, penelitian ini tidak lulus pengujian autokorelasi *durbin watson* dikarenakan nilai DW sebesar nilai 1,465 tidak berada di antara 1,9221 (dU) dan 2,0779 (4 - dU), tetapi lebih rendah dari 1,7006 (dL). Namun, seluruh variabel independen penelitian ini lulus pengujian multikolinearitas dengan nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF lebih besar dari 10. Penelitian ini juga lulus pengujian heteroskedastisitas dengan nilai signifikan pada seluruh variabel independen yang diuji lebih besar dari 0,05, sehingga terindikasi homoskedastisitas. Alhasil, adanya masalah normalitas dan autokorelasi pada penelitian ini akan diakui sebagai keterbatasan penelitian.

4.3 Pengujian *R-Square*, Model (F), dan Hipotesis (t).

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian koefisien determinasi, pengujian model penelitian, dan pengujian hipotesis. Penelitian ini memiliki nilai R^2 sebesar 21,4% yang mengindikasikan bahwa 14 variabel independen yang diuji dapat menjelaskan atau memberikan pengaruh terhadap variabel dependen pengungkapan sustainability reporting. Lalu, 78,6% lainnya dijelaskan oleh variabel independen yang tidak ikut terlibat di dalam model regresi penelitian. Pengujian model penelitian berbasis *Annova* menghasilkan nilai signifikansi model penelitian sebesar $<0,001$ pada taraf signifikansi 1%. Berdasarkan pengujian hipotesis pertama (H1) pada tabel 3, terbukti bahwa ukuran komisaris memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability reporting. Artinya, besarnya keanggotaan komisaris berkontribusi dalam mewujudkan kepentingan para *stakeholder* melalui fungsi pengawasan oleh setiap individu komisaris dalam mengawasi praktik pengungkapan *sustainability reporting* yang

dikelola oleh direksi dan memberikan arahan serta nasihat kepada direksi untuk mengevaluasi secara berkala topik material keberlanjutan yang perlu diungkapkan dalam sustainability reporting. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Hu & Loh (2018), Girella et al. (2022), dan Erin & Adegboye (2022) bahwa semakin tinggi jumlah individu yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai komisaris mampu mendorong pengungkapan sustainability reporting berdasarkan standar GRI.

Tabel 3 Hasil Pengujian Penelitian

$SRDI_{i,t} = \alpha + \beta_1 UK_{i,t} + \beta_2 UKI_{i,t} + \beta_3 UD_{i,t} + \beta_4 UKA_{i,t} + \beta_5 LPK_{i,t} + \beta_6 LPKI_{i,t} + \beta_7 LPD_{i,t} + \beta_8 RDK_{i,t} + \beta_9 RDD_{i,t} + \beta_{10} RKA_{i,t} + \beta_{11} UP_{i,t} + \beta_{12} LQDT_{i,t} + \beta_{13} PFT_{i,t} + \beta_{14} LEV_{i,t} + \varepsilon$					
Variabel	Direction of Hypothesis	Coefficients B	t	Sig.	Sig. (One-Tailed)
(Constant)		0.021	0.152	0.879	0.4395
UK	(+)	0.029	3.189	0.002	0.001***
UKI	(+)	0.095	1.082	0.281	0.1405
UD	(+)	-0.004	-0.711	0.478	0.239
UKA	(+)	-0.017	-1.055	0.293	0.1465
LPK	(+)	0.036	1.228	0.221	0.1105
LPKI	(+)	0.025	0.826	0.410	0.205
LPD	(+)	0.038	0.750	0.454	0.227
RDK	(+)	0.000	-0.344	0.731	0.3655
RDD	(+)	0.000	0.514	0.608	0.304
RKA	(+)	0.004	2.777	0.006	0.003***
UP	(+)	0.016	1.752	0.081	0.0405
LQDT	(+)	0.000	-0.053	0.957	0.4785
PFT	(+)	0.234	1.439	0.152	0.076
LEV	(+)	-0.060	-1.030	0.304	0.152
Variabel Dependen: SRDI F = 4.250, Sig = <0.001 R-Square = 0.214 Adjusted R-Square = 0.163 Total Observasi (N) = 234 Total Perusahaan = 78 ***, **, * menunjukkan tingkat signifikansi 1%, 5%, 10% (sig. one-tailed)					

Sumber: Diolah Penulis menggunakan SPSS 29 (2023)

Melalui hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa ukuran komisaris independen yang dilihat dari proporsinya di dalam dewan komisaris tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*. Bila diinterpretasikan, hasil temuan ini mengindikasikan bahwa pengungkapan *sustainability reporting* tidak ditentukan oleh besarnya anggota komisaris independen di dalam struktur dewan komisaris oleh karena komisaris independen yang dimiliki perusahaan hanya untuk memenuhi standar ketentuan yang ditetapkan oleh regulator yaitu OJK tetapi tidak

mempengaruhi peningkatan praktik pengungkapan sustainability reporting. Hasil temuan ini serupa dengan hasil penelitian oleh Kumar et al. (2022), Rachmadanty & Agustina (2023), bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa *directors size* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*. Bila diinterpretasikan, temuan empiris ini mengartikan bahwa semakin besar jumlah direksi tidak menentukan tingginya pengungkapan *sustainability reporting*, oleh karena setiap direktur dalam struktur direksi memiliki fokusnya yang berbeda-beda seperti halnya direktur yang berfokus pada pengurusan aspek sumber daya manusia maupun ketenagakerjaan perusahaan, direktur yang berfokus pada aspek riset dan pengembangan produk perusahaan, direktur yang berfokus pada aspek keuangan perusahaan, direktur yang berfokus pada aspek strategi pemasaran produk perusahaan, dan sebagainya. Selain itu, ukuran direksi yang semakin besar akan menimbulkan proses komunikasi yang semakin rumit, sehingga informasi keberlanjutan di dalam *sustainability reporting* yang diberikan kepada para pemangku kepentingan cenderung bias (Tjahjadi et al., 2021).

Melalui hasil pengujian hipotesis keempat (H4) membuktikan bahwa ukuran komite audit atau *audit committee size* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*. Bila diinterpretasikan, temuan empiris ini mengartikan bahwa besarnya jumlah individu di dalam komite audit tidak menentukan tingginya pengungkapan *sustainability reporting* oleh karena peran yang diberikan oleh masing-masing anggota komite audit lebih berfokus pada peningkatan kualitas, keakuratan, dan kesesuaian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Sebagaimana pemaparan oleh Utama et al. (2022) bahwa komite audit memiliki tugas untuk menelaah sistem *internal control* pada suatu perusahaan, memastikan kualitas *financial report* atau pelaporan keuangan perusahaan, dan meningkatkan fungsi kinerja audit dalam suatu perusahaan. Sehingga, ukuran komite audit tidak terlihat relevansinya dengan peningkatan pengungkapan *sustainability reporting*, oleh karena peran yang diberikan setiap individu dalam komite audit lebih berfokus pada ranah peningkatan kualitas laporan keuangan perusahaan, fungsi audit, dan pengendalian internal perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis kelima (H5a), keenam (H5b), dan ketujuh (H5c) membuktikan bahwa latar belakang pendidikan komisaris, komisaris independen, dan direksi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*. Peneliti memandang bahwa latar pendidikan ilmu seputar keahlian keuangan yang dimiliki komisaris belum tentu mengindikasikan bahwa setiap individu komisaris, komisaris independen, dan direksi lebih memperhatikan pengungkapan *sustainability reporting*, oleh karena ilmu keahlian keuangan yang dimiliki setiap komisaris juga mempengaruhinya dalam memperhatikan pengungkapan *financial reporting*. Artinya, semakin tinggi proporsi komisaris, komisaris independen, dan direksi dengan latar pendidikan sehubungan dengan keahlian keuangan tidak memberikan kontribusi pada fungsi pengawasan oleh komisaris maupun komisaris independen dan pada fungsi pelaksanaan oleh direksi dalam meningkatkan pengungkapan *sustainability reporting*. Sebagaimana menurut Aladwey et al. (2022) dan Wijayanti & Setiawan (2023) bahwa latar pendidikan dan keahlian dewan lebih terlihat relevansinya dalam memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan pelaporan keuangan serta memprioritaskan praktik *financial reporting* yang bersifat *mandatory*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedelapan (H6) dapat dibuktikan bahwa tingkat frekuensi rapat dewan komisaris atau *board of commissioners frequency meeting* tidak berdampak atau berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *sustainability*

reporting. Bila diinterpretasikan lebih lanjut semakin sering pelaksanaan rapat dewan komisaris tidak menentukan tingginya *sustainability reporting* yang diungkapkan perusahaan, oleh karena rapat yang diselenggarakan belum tentu membicarakan problematika sehubungan dengan pengungkapan kinerja keberlanjutan *non-financial* untuk dituangkan ke dalam kerangka *sustainability reporting*. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga mengindikasikan bahwa seluruh dewan komisaris yang hadir dalam rapat gabungan belum tentu turut serta secara aktif menuangkan aspirasinya di dalam pembahasan yang dilakukan selama rapat berlangsung.

Hasil pengujian hipotesis kesembilan (H7) menunjukkan hasil berkontradiksi dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, dimana dalam hasil pengujian ini tingkat frekuensi rapat direksi atau *board of directors frequency meeting* tidak memberikan dampak atau pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*. Bila diinterpretasikan lebih lanjut bahwa besarnya pengungkapan *sustainability reporting* tidak dicerminkan dari tingginya frekuensi pelaksanaan rapat direksi. Dengan kata lain semakin sering pelaksanaan rapat direksi tidak menentukan tingginya *sustainability reporting* yang diungkapkan perusahaan, oleh karena rapat yang diselenggarakan belum tentu membicarakan problematika sehubungan dengan pengungkapan kinerja keberlanjutan *non-financial* untuk dituangkan ke dalam kerangka GRI. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga mengindikasikan bahwa seluruh direksi yang hadir dalam rapat internal maupun rapat gabungan belum tentu turut serta secara aktif di dalam pembahasan yang dilakukan selama rapat berlangsung.

Melalui pengujian hipotesis kesepuluh (H8) membuktikan bahwa hasil temuan ini selaras dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dan sejalan dengan hasil temuan oleh penelitian Buallay & Al-Ajmi (2020) bahwa besarnya pengungkapan *sustainability reporting* meningkat seiring dengan besarnya jumlah pelaksanaan rapat komite audit. Bila diinterpretasikan, rapat yang diselenggarakan oleh komite audit berkontribusi dalam memastikan keakuratan data dengan melakukan verifikasi transparansi data informasi keberlanjutan yang disajikan dalam *sustainability reporting* sesuai dengan tindakan aktual keberlanjutan yang dilakukan perusahaan. Sehingga, melalui notulen rapat khususnya terkait hasil evaluasi pengungkapan *sustainability reporting* yang dihasilkan dari intensitas pelaksanaan rapat oleh komite audit dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi atau masukan secara berkala kepada direksi untuk memperbaiki dan meningkatkan pengungkapan *sustainability reporting* melalui penetapan tujuan dan strategi perusahaan oleh direksi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian regresi linear dalam penelitian ini, membuktikan bahwa terdapat dua variabel tata kelola berupa *commissioners size* dan *audit committee frequency meeting* yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability reporting*. Sedangkan, delapan variabel tata kelola berupa *commissioners independence size*, *directors size*, *audit committee size*, *commissioners education background*, *commissioners independence education background*, *directors education background*, *Board of Commissioners frequency meeting*, dan *Board of Directors frequency meeting* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.

Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam bahwa ukuran komisaris dan rapat komite audit di Indonesia berperan penting dalam memenuhi keinginan para pemangku kepentingan dan mampu meningkatkan reputasi perusahaan yang tercipta melalui. Kontribusi yang diberikan komisaris dan melalui hasil dari pembahasan rapat dalam komite audit yang mampu mendorong peningkatan pengungkapan *sustainability*

reporting. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong dan memotivasi banyak pihak yang akan mengambil topik penelitian yang serupa untuk terus-menerus mengembangkan hingga menyempurnakan komposisi variabel, sampel penelitian, dan topik penelitian ini.

Bagi para praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh komisaris dan rapat komite audit untuk meningkatkan intensi dan kualitas pengungkapan *sustainability reporting*. Selain itu, melihat minimnya kecenderungan perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah sebagai regulator untuk menetapkan regulasi yang lebih mengikat dan sanksi yang tegas agar dapat mendorong intensi perusahaan di Indonesia dalam melaporkan *sustainability reporting* secara transparan yang tidak hanya berdasarkan kerangka standar POJK, namun berdasarkan kerangka standar internasional yaitu GRI.

Penelitian yang telah dijalankan ini tidak terlepas dari segala kekurangan, sebagaimana penjabaran keterbatasan penelitian sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutan sesuai dengan standar GRI di bawah tahun 2020, sehingga objek penelitian ini hanya sebatas pada perusahaan publik yang tercatat dan diakui pada situs BEI yang konsisten mengungkap standar GRI pada periode 2020 - 2022.
- 2) Terdapat masalah asumsi klasik berupa normalitas dan autokorelasi pada penelitian ini, oleh karena penelitian ini tidak lulus kriteria hasil pengujian asumsi klasik *One-Sample Kolmogorov Smirnov* dan pengujian *Durbin-Watson*.

5.2 Saran

Melalui evaluasi atas penelitian ini, adapun saran yang diberikan oleh peneliti yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

- 1) Peneliti selanjutnya dapat memperluas periode penelitian dengan mengambil objek perusahaan-perusahaan pada skala ASEAN dan dapat menghasilkan hasil penelitian yang menunjukkan perbandingan di setiap negara di Asia Tenggara.
- 2) Melihat nilai dari R^2 yang masih cenderung rendah, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan komposisi variabel independen tata kelola sehubungan dengan *board diversity* atau keberagaman dewan, yakni: umur, gender, dan tingkat edukasi.

REFERENSI

Ahmad, N. B. J., Rashid, A., & Gow, J. (2018). Corporate board gender diversity and corporate social responsibility reporting in Malaysia. *Gender, Technology and*

- Development*, 22(2), 87–108. <https://doi.org/10.1080/09718524.2018.1496671>
- Al-Qudah, A. A., & Houcine, A. (2023). Firms’ characteristics, corporate governance, and the adoption of sustainability reporting: evidence from Gulf Cooperation Council countries. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-02-2023-0066>
- Aladwey, L., Elgharbawy, A., & Ganna, M. A. (2022). Attributes of corporate boards and assurance of corporate social responsibility reporting: evidence from the UK. *Corporate Governance (Bingley)*, 22(4), 748–780. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2021-0066>
- Alkayed, H., & Omar, B. F. (2022). Determinants of the extent and quality of corporate social responsibility disclosure in the industrial and services sectors: the case of Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-05-2021-0133>.
- Alshbili, I., Elamer, A. A., & Beddewela, E. (2020). Ownership types, corporate governance and corporate social responsibility disclosures: Empirical evidence from a developing country. *Accounting Research Journal*, 33(1), 148–166. <https://doi.org/10.1108/ARJ-03-2018-0060>
- Anyigbah, E., Kong, Y., Edziah, B. K., Ahoto, A. T., & Ahiaku, W. S. (2023). Board Characteristics and Corporate Sustainability Reporting: Evidence from Chinese Listed Companies. *Sustainability (Switzerland)*, 15(4), 1–26. <https://doi.org/10.3390/su15043553>
- Appiagyei, K., Djajadikerta, H. G., & Mat Roni, S. (2023). The impact of corporate governance on integrated reporting (IR) quality and sustainability performance: evidence from listed companies in South Africa. *Meditari Accountancy Research*, 31(4), 1068–1092. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-07-2020-0946>
- Buallay, A., & Al-Ajmi, J. (2020). The role of audit committee attributes in corporate sustainability reporting: Evidence from banks in the Gulf Cooperation Council. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 249–264. <https://doi.org/10.1108/JAAR-06-2018-0085>
- Chams, N., & García-Blandón, J. (2019). Sustainable or not sustainable? The role of the board of directors. *Journal of Cleaner Production*, 226, 1067–1081. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.118>
- Dirgantara, A. (2021). *Diduga Cemari Lingkungan 34 Tahun, Pabrik di Toba Diadukan ke Bareskrim*. news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-5598047/diduga-cemari-lingkungan-34-tahun-pabrik-di-toba-diadukan-ke-bareskrim>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Source: The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line 21st Century Business*.
- Erin, O., & Adegboye, A. (2022). Do corporate attributes impact integrated reporting quality? An empirical evidence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 20(3–4), 416–445. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2020-0117>
- Erin, O., Adegboye, A., & Bamigboye, O. A. (2022). Corporate governance and sustainability reporting quality: evidence from Nigeria. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 13(3), 680–707. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-06-2020-0185>
- Fogarty, T., & Rezaee, Z. (2019). *Business Sustainability, Corporate Governance, and Organizational Ethics*. Wiley. wileysgp.ipublishcentral.net
- Giannarakis, G., Andronikidis, A., & Sariannidis, N. (2020). Determinants of environmental disclosure: investigating new and conventional corporate governance characteristics.

Annals of Operations Research, 294(1–2), 87–105. <https://doi.org/10.1007/s10479-019-03323-x>

- Girella, L., Zambon, S., & Rossi, P. (2022). Board characteristics and the choice between sustainability and integrated reporting: a European analysis. *Meditari Accountancy Research*, 30(3), 562–596. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-11-2020-1111>
- Githaiga, P. N., & Kosgei, J. K. (2023). Board characteristics and sustainability reporting: a case of listed firms in East Africa. *Corporate Governance (Bingley)*, 23(1), 3–17. <https://doi.org/10.1108/CG-12-2021-0449>.
- Global Sustainability Standards Board. (2023). GRI 1 - Landasan 2021. *Globalreporting.Org*, 42. <https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-bahasa-indonesia-translations/>
- Hambrick, & Mason. (1984). Upper Echelons : of Reflection The Its Organization as reflection of its Top managers. *Management*, 9(2), 193–206. <http://www.jstor.org/stable/258434>
- Hu, M., & Loh, L. (2018). Board governance and sustainability disclosure: A cross-sectional study of Singapore-listed companies. *Sustainability (Switzerland)*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/su10072578>.
- Ikhsanudin, A. (2022). 2 Pejabat Perusahaan Sawit di Riau Jadi Tersangka Pencemaran Lingkungan. *news.detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-6316203/2-pejabat-perusahaan-sawit-di-riau-jadi-tersangka-pencemaran-lingkungan>.
- Kumar, K., Kumari, R., Nandy, M., Sarim, M., & Kumar, R. (2022). Do ownership structures and governance attributes matter for corporate sustainability reporting? An examination in the Indian context. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 33(5), 1077–1096. <https://doi.org/10.1108/MEQ-08-2021-0196>.
- Madona, M. A., & Khafid, M. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 19(1), 22–32. <https://doi.org/10.25077/josi.v19.n1.p22-32.2020>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, (2014). [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK 33. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK%2033-Direksi-dan-Dewan-Komisaris-Emiten-Atau-Perusahaan-Publik.pdf).
- Rachmadanty, A. P., & Agustina, L. (2023). Pengaruh ukuran direksi, dewan komisaris independen, kepemimpinan ganda, jenis perusahaan, sustainability committee, aktivitas perusahaan, kepemilikan asing, dan struktur kepemilikan terhadap sustainability report. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 16(2), 142. <https://doi.org/10.26623/jreb.v16i2.5925>
- Tjahjadi, B., Soewarno, N., & Mustikaningtiyas, F. (2021). Good corporate governance and corporate sustainability performance in Indonesia: A triple bottom line approach. *Heliyon*, 7(3), e06453. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06453>
- Utama, S., Fitriany, Siregar, S. V., Rahadian, Y., Utama, C. A., & Simanjuntak, J. (2022). *Tata Kelola Korporat di Indonesia (Teori, Prinsip, dan Praktik)* (G. Sartika (ed.)). Salemba Empat.
- Wijayanti, R., & Setiawan, D. (2023). The role of the board of directors and the sharia supervisory board on sustainability reports. *Journal of Open Innovation: Technology*,

Market, and Complexity, 9(3), 100083. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100083>

Zahid, M., Rahman, H. U., Ali, W., Khan, M., Alharthi, M., Imran Qureshi, M., & Jan, A. (2020). Boardroom gender diversity: Implications for corporate sustainability disclosures in Malaysia. *Journal of Cleaner Production*, 244, 118683. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118683>

Zhou, G., Rezaee, Z., Tsui, J., & Cheng, P. (2019). Business Sustainability in Asia. In *Business Sustainability in Asia* (1st ed.). John Wiley & Sons, Inc.